

KEKERASAN NEGARA PADA WARGA DALAM NOVEL LAMPUKI KARYA ARAFAT NUR

oleh:

Eko Cahyo Prawoto

Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

ABSTRAK

Novel Lampuki Karya Arafat Nur sangat menarik untuk dikaji dengan menggunakan teori totalitarian, kekerasan kultural, dan kekerasan simbolik, karena kisah yang terepresentasikan dalam novel tersebut merupakan kecamuk yang pernah terjadi di bumi Aceh, banyak sekali kekerasan yang mengarah pada pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara maupun aparatnya. Oleh karena itu, dari pengkajian novel Lampuki dapat diketahui bentuk kekerasan fisik, kekerasan kultural, dan kekerasan simbolik. Di samping faktor tersebut, novel Lampuki dipilih untuk dilakukan pengkajian, karena sepengetahuan peneliti novel tersebut belum pernah dikaji dari segi sosiologi sastra khususnya tindak kekerasan negara.

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah, bagaimana bentuk kekerasan fisik, kekerasan kultural, dan kekerasan simbolik, yang dilakukan negara pada warga? Berkaitan dengan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk kekerasan fisik, kekerasan kultural, dan kekerasan simbolik, yang dilakukan oleh negara dalam novel Lampuki karya Arafat Nur.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi sastra dengan menggunakan teori totalitarianism, kekerasan kultural, dan kekerasan simbolik. Data dalam penelitian ini berupa data deskriptif yaitu kalimat maupun paragraf tentang kekerasan, meliputi, kekerasan fisik, kekerasan kultural, dan kekerasan simbolik. Sumber data dalam penelitian ini adalah novel yang berjudul Lampuki karya Arafat Nur, yang memiliki *cover* berwarna merah, dan di bagian *cover* depan tergambar sosok pria berkumis tebal yang sedang membawa senjata api. Novel tersebut memiliki 434 halaman, yang diterbitkan pada bulan Mei 2011. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah catatan tertulis yang isinya merupakan setiap pernyataan yang tertulis yang disusun untuk keperluan pengujian atau menyajikan akunting, dan berguna bagi sumber data, bukti, informasi, kealamianya yang sukar diperoleh, sukar ditemukan dan membuka kesempatan untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, kekerasan secara fisik sangat mendominasi, dibandingkan dengan kekerasan kultural dan kekerasan simbolik, yang

dilakukan negara maupun aparatnya. Hal ini membuktikan, bahwa pemerintahan pada masa Orde Baru memiliki ruang tanpa batas dalam mengatur segala permasalahan dengan tujuan berjalannya mekanisme-mekanisme politik, yang sudah ditetapkan.

Kata kunci: pendekatan sosiologi, kekerasan fisik, kekerasan kultural, kekerasan simbolik.

A. Pendahuluan

Novel merupakan salah satu bentuk karya sastra prosa yang memberikan gambaran permasalahan kehidupan manusia, novel memberikan sebuah cerminan masyarakat yang melahirkannya, yang dapat menumbuhkan rasa empati, emosi, dan humor dengan berbagai peristiwa yang diangkatnya. Selain itu, novel juga memberikan pelajaran kepada para pembaca dalam menyikapi berbagai persoalan, mulai dari kepentingan yang menimbulkan konflik, kekuasaan yang dominan atas kelompok yang terdominasi, cinta dan seribu kisah manisnya, pendidikan dengan segala perjuangannya, dan lain sebagainya, yang semuanya itu berakar dari realitas yang diwujudkan menjadi sebuah cerita panjang.

Novel yang dikaji dalam penelitian ini berjudul *Lampuki* karya Arafat Nur. Novel tersebut dipilih karena memiliki kelebihan dari segi isi, yang meliputi perselingkuhan, cinta, dan konflik yang sarat akan realitas yang terjadi beberapa waktu lalu di bumi Aceh. Novel tersebut juga merupakan salah satu pemenang unggulan sayembara menulis novel DKJ tahun 2010. Sehingga, selain dengan prestasi tersebut, kisah yang terdapat dalam novel *Lampuki* menyuguhkan tantangan tersendiri bagi peneliti untuk melakukan pengkajian. Tantangan yang dimaksud ialah, mengungkapkan kekerasan negara terhadap warga, yang diawali dengan kisah seorang lelaki kampungankumis tebal bernama Ahmadi, mantan berandal yang tampil menjadi pemimpin gerilyawan, Ahmadi kerap kali menghasut para warga untuk ikut mengangkat senjata melawan aparat negara. Selain khotbahnya yang selalu berapi-api kepada para warga, dia kerap kali membuat ulah, menyerang pos penjagaan aparat di pasar simpang lima, yang menyebabkan tewasnya beberapa anggota aparat, hal itulah yang memicu kemarahan aparat.

Ahmadi yang selalu lolos dari kejaran orang-orang berseragam, meninggalkan duka bagi warga *Lampuki*, yang kerap menjadi pelampiasan kemarahan aparat. Dengan segala kemarahannya, para aparat kerap kali berbuat kasar pada warga, mereka dituduh bersekongkol dengan pemberontak, para aparat tidak segan-segan memukul, menendang, menghina bahkan membunuh warga tanpa ada alasan yang jelas. Seperti yang terdapat pada kutipan berikut.

“Orang-orang bersenjata itu sangat membenci roman lelaki. Cara satu-satunya agar mereka tidak melihat lagi muka jelek lelaki-lelaki di sini adalah dengan menyekap dan melenyapkan mereka; menangkap mereka secara diam-diam dan dengan bermacam alasan; mengumpulkan dan memaksa

mereka menggali lubang sendiri di pinggiran hutan lalu menembak, dan membantai mereka sekalian. Itu cara paling hemat dan mudah dari segala pilihan lain untuk menghapus jejak sejarah” (Nur, 2011:32)

Kekerasan yang terepresentasikan pada kutipan di atas, merupakan sebuah realitas bahwa, peran negara sesungguhnya tidak melindungi warganya melainkan memerangi mereka dengan segelitik alasan, bahwa mereka mempunyai kekuasaan tanpa batas, dan berhak mengatur segala permasalahan dengan tujuan demi kesejahteraan bersama. Memang terkadang tujuan itu benar dan mempunyai wujud yang mampu menimbulkan senyum bagi mereka yang menikmatinya, namun tidak sedikit dari mereka yang menjadi korban dari kebrutalan aparat negara, dengan segala kekuasaannya menindas dan mempertahankan sebuah ideologi.

Orasi, demonstrasi, pemberontakan, dan lain sebagainya, sebenarnya merupakan sebuah kritik dan kontrol bagi kebijakan-kebijakan pemerintah yang kurang memihak kepada masyarakat. Sehingga, mereka meneriakan hak-hak mereka yang belum mereka peroleh, dan seharusnya pemerintah menyadari dan menyikapi hal tersebut dengan mengubah kebijakan-kebijakan, sebagai respon positif atas teriakan-teriakan masyarakat, yang kemudian direalisasikan guna mengubah nasib mereka ke arah yang lebih baik, karena pada dasarnya pemerintah berkewajiban atas kesejahteraan masyarakatnya.

Adapun alasan diangkatnya kekerasan negara terhadap warga dalam novel *Lampuki* sebagai bahan kajian, karena kekerasan yang digambarkan dalam novel tersebut mengacu pada kekerasan negara tidak hanya terwujud dalam kekerasan terbuka (fisik) namun kekerasan itu juga merambah pada kekerasan yang bersifat tertutup (ancaman), *agresif*, dan *difensive* yang semata-mata demi merealisasikan sebuah ideologi. Hal semacam inilah yang menimbulkan sebagian kelompok merasa tidak mendapatkan keadilan, kenyamanan, kemudahan dalam melepaskan diri dari jerat kemiskinan, dan dengan segala keterbatasannya mengubah pemikiran mereka menjadi radikal dan tidak segan-segan untuk melakukan aksi pemberontakan, yang berujung pada kebejatan hati nurani aparat negara, yang membabitkan pada semua masyarakat, terutama kaum laki-laki. Jika sudah demikian nurani aparat sudah tertutup oleh nafsu untuk segera melampiaskan kemarahannya yang mengacu pada pelanggaran HAM, dan legitimasi kekuasaan yang selalu merestui mereka dalam memerangi masyarakat. Permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini difokuskan untuk mengungkapkan bentuk kekerasan fisik, kekerasan kultural, dan kekerasan simbolik yang dilakukan negara pada warga dalam novel *Lampuki* karya Arafat Nur. Tujuan dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan bentuk kekerasan yang meliputi kekerasan fisik, kekerasan kultural, dan kekerasan simbolik yang dilakukan negara pada warga dalam novel *Lampuki* karya Arafat Nur

B. Kajian Teori

1. Teori Totalitarianism

“Dalam *The origins of Totalitarianism* (1973) Hannah Arendt memperlihatkan situasi sosial politik yang memungkinkan munculnya kekuasaan totaliter. Meski Arendt merujuk pada Nazisme dan Stalinisme, bukan berarti hal itu tidak terjadi belahan dunia yang lain, (dalam Pitaloka, 2010:1)”. Lebih lanjut Pitaloka (2010:1) menambahkan.

“Menurut pengamatan penulis, mekanisme kekuasaan yang dijalankan rezim Orde Baru memiliki kemiripan dengan kedua rezim totaliter tersebut. Berbagai peristiwa di awal berdirinya Orde Baru memperlihatkan kekuasaan negara menjadi teror yang menakutkan, seperti kasus-kasus penangkapan, pembuangan dan hukuman penjara tanpa proses pengadilan yang menimpa ratusan ribu orang, yang dianggap terlibat G30S.”

a. Tendensi-Tendensi Totaliter

“Dalam kata pengantar untuk buku *Asal-Usul Totalitarianisme: Jilid III Totalitarianisme*, Magnsi-Suseno mengatakan, kita harus tetap mewaspadaai adanya tendensi-tendensi totaliter, atau potensial menjadi totaliter”. Tendensi-tendensi totaliter berupa: 1) legitimasi gampang atas pelanggaran hak asasi manusia atas nama tujuan-tujuan ideologi; 2) memonopolisasi informasi dengan alasan bahwa pemerintah lebih tahu apa yang harus dilakukan masyarakat. Pemerintah tahu apa yang boleh dan tidak boleh ditonton, dibaca, didiskusikan; 3) pembatasan pengorganisasian masyarakat pada organisasi-organisasi yang disiapkan pemerintah; 4) penggunaan cara-cara di luar hukum untuk mengancam, tidak hanya dianggap penjahat, tapi juga seluruh masyarakat, agar takut dan tidak berani mempertanyakan kebijakan pemerintah.”

“Tendensi-tendensi totaliter lain yang diperlihatkan Arendt dalam *The origins of Totalitarianism*, terungkap dalam bentuk; 1) kekuasaan ada di tangan satu orang yang dianggap pemimpin tertinggi; 2) menerapkan sistem satu partai, menggunakan atau intel yang berfungsi mengontrol dan melakukan teror terhadap masyarakat; 3) melakukan pembersihan berulang-ulang dengan cara menerapkan paham “musuh objektif”; 4) menerapkan metode penghancuran hubungan sosial dan keluarga melalui paham “kesalahan disebabkan oleh hubungan” dan jasa diukur dengan jumlah laporan-laporanmu mengenai teman dekat”, (Pitaloka, (2010:3-4).”

“Pemikiran Arendt relevan dengan situasi politik Indonesia berkaitan dengan gagasannya mengenai *banality of evil*. Lewat *Eichmann in Jerusalem: report in Banality of Evil* (1963), Arendt mengungkapkan bagaimana negara menciptakan kejahatan menjadi sesuatu yang dianggap lumrah. Dengan kepatuhan warga negara yang diperoleh melalui propaganda dan teror, kekerasan yang dilakukan negara dapat membuat orang menjadi enggan berpikir dan tidak mampu menilai secara kritis. Dari kedua hal tersebut, kekerasan negara kemudian menjalar pada warganya, menularkan sikap tanpa sungkan-sungkan terlibat kejahatan. Kepribadian yang lahir darinya adalah kepribadian yang diwarnai oleh mandulnya kesadaran hati nurani. Karakter semacam

ini tidak melekat pada kalangan tertentu, seperti golongan birokrat, tapi juga menjangkiti masyarakat sipil, bahkan diadopsi pula oleh mereka yang menjadi korban, (Pitaloka, 2010:4).”

2. Teori Arena Kultural

“Teori arena kultural yang dikemukakan Bourdieu bisa dilihat sebagai kontekstualisasi radikal, Bourdieu (2010:xxii-xxiii).

- a. Teori ini bukan hanya menyoroti karya-karya, yang relasinya bisa dilihat di dalam ruang kemungkinan yang tersedia dan di dalam perkembangan historis ruang-ruang kemungkinan tersebut, tapi juga menelisik para produsen karya berdasarkan strategi dan lintasan, habitus individu dan kelas, serta posisi objektif mereka di dalam arena.
- b. Teori ini juga mencakup analisis tentang struktur arena itu sendiri-yakni posisi-posisi yang ditempati para produsen (seperti penulis, seniman)-dan konsekrasi serta legitimasi yang membuat produk kultural sebagai produk kultural (publik, penerbit kritikus, galeri, akademi, dan lain sebagainya).
- c. Akhirnya teori ini mencakup analisis tentang posisi arena di dalam arena kekuasaan yang lebih luas.”

“Singkatnya, teori arena produksi kultural menurut Bourdieu dan metode analitisnya yang dalam dan ketat meliputi kondisi-kondisi sosial produksi, sirkulasi dan konsumsi barang-barang simbolis. Model Bourdieu yang sangat kompleks ini memastikan agar ia tidak terperosok ke dalam reduksionisme, entah pembacaan internal murni maupun cara-cara eksternal atas teks-teks kultural. Penjelasan utuh tentang karya-karya seni ditemukan bukan di dalam teks, tidak juga di dalam sejarah dan struktur arena itu sendiri, dengan komponen-komponen yang beragam, dan di dalam relasi antara arena kultural dan arena kekuasaan. Seperti yang dikatakan Bourdieu (2010:xxiii).”

“Teori arena (mengarah) pada penolakan terhadap kaitan langsung biografi individual dengan karya sastra (atau yang berkaitan dengan ‘kelas sosial’ yang menjadi asal suatu karya) maupun pada penolakan terhadap analisis internal karya individual bahkan analisis intertekstualnya. *Karena yang mestinya kita lakukan adalah melakukan keduanya secara bersamaan.*”

“Berdasarkan kutipan di atas, dapat diketahui bahwa, ekonomi arena kultural didasarkan pada suatu kepercayaan khusus yang membentuk sebuah karya kultural (contohnya, karya sastra, karya seni) dan nilai estetis atau nilai sosialnya. Dalam bentuknya yang paling tradisional dan kanonis, kepercayaan ini mengandung keyakinan tentang otonomi karya dari determinan-determinan eksternal dan sebuah pemahaman esensialistik terhadap keabsolutan karya. Namun seperti yang diingatkan oleh Bourdieu, otonomi arena seni maupun teori-teori seni murni ini adalah fenomena yang relatif baru, artinya bentuk yang umumnya kita kenal sekarang sebenarnya berasal dari abad sembilan belas kemarin.”

“Dengan cara yang sama, nilai estetis yang dibentuk secara sosial, yang bergantung kepada perubahan konstan dan kompleks dari seperangkat situasi yang melibatkan berbagai faktor sosial dan kelembagaan. Sastra, seni dan para produsernya tidak terlepas dari kompleksitas kerangka institusional yang mengotorisasi, memungkinkan, memberdayakan dan melegitimasi mereka. Semua kerangka kerja ini harus dipadukan di dalam analisis apapun yang memang ingin menyediakan sebuah pemahaman mendalam tentang barang-barang kultural dan praktik-praktiknya, yang semuanya itu tidak terlepas dari rasionalitas.”

“Konsep arena sendiri menyediakan suatu cara untuk melampaui analisis internal (*formalisme* atau *hermeneutis*) maupun penjelasan eksternal, yang keduanya dilihat Bourdieu tidak tepat dan reduktif, Bourdieu (2010:xxiii).

3. Kekerasan Simbolik

Harker, (2009:217-219) ini mendekati pada peran sentral kekuasaan dalam teori bahasa Bourdieu. Di sini tampak bagi saya, Nietzsche yang ‘eksistensial’ mengoreksi Wigenstein yang ‘linguistik’. Sebab ‘bentuk-bentuk kehidupan’ Wittgenstein, betapa pun maksudnya bersifat sosial, tidak pernah diberikan pakaian sosiologis dan, karenanya, cenderung untuk tetap bertahan sebagai konstruksi idealis yang memiliki relevansi marjinal terhadap ilmu sosial. Dengan berpegangan pada pandangan kekuasaan Nietzsche, Bourdieu menyediakan landasan meterial dan signifikansi sosiologis untuk ‘permainan bahasa’ dan ‘bentuk kehidupan’ Wittgenstein.

Ini dilakukan Bourdieu dengan cara memperluas dan merinci ide tindakan berbicara (*speech-acts*). Wittgenstein, Austin, Searle, dan para filsuf ‘linguistik’ lainnya mengakui bahwa beberapa bentuk bahasa dapat ditafsirkan terutama sebagai tindakan manusia ; jadi ‘saya berjanji memberimu \$100’, ‘saya mengambilmu menjadi istri’, ‘saya bertaruh dengan kamu...’, dan sebagainya, bukanlah sekadar potongan-potongan bicara, tetapi merupakan tindakan-tindakan berjanji, menikahi, meletakkan sebuah taruhan, dan sebagainya. *Speech-acts* semacam ini dinamakan Austin sebagai ungkapan performatif, dan teorinya meliputi ide-ide ‘*kekuatan illocutioner*’ dan ‘*kekuatan perlocutioner*’. Ia berpendapat, ungkapan itu memiliki:

- a. ‘Suatu makna’ dalam sebuah bahasa.
- b. Suatu ‘*kekuatan illocutioner*’, yakni apa yang *dilakukan* seorang pembicara ketika berbicara: ‘pintu itu terbuka’ dapat berarti tutup pintu itu’; dan.
- c. Suatu ‘*kekuatan perlocutioner*’ atau efek-efek berbicara. Pendengar mungkin akan menjadi marah terhadap pembicara ketimbang menuruti perintah implisitnya.

Bourdieu memperluas ide ini dan menempatkannya dengan kukuh dalam dunia materi. Dengan begitu, ia mengecam para filsuf yang, mengikuti Austin. “Mencari dalam kata-kata mereka sendiri ‘*kekuatan illocutioner*’ yang mereka lihat sekilas dari waktu ke waktu dalam berbagai performatif.

Di sini, harus dikatakan, Bourdieu *sebrono* dalam memberi kesan bahwa Austin dan para pengikutnya menempatkan ‘*kekuatan illocutioner*’ dan ‘*kekuatan*

perlocutioner' dalam bahasa. Mereka berusaha keras memperlihatkan bahwa situasi sosial merupakan hal krusial dalam menentukan 'makna' ungkapan-ungkapan. Bagi Bourdieu, 'ungkapan-ungkapan performatif' Austin hanyalah contoh dari sifat dasar bahasa sebagai satu keseluruhan.

"Persoalan ungkapan-ungkapan performatif menjadi jelas apabila ia dipandang sebagai kasus pertikular tentang efek-efek dominasi simbolik yang hadir dalam setiap pertukaran linguistik.

'Tanda-tanda' linguistik bukanlah sekadar simbol-simbol untuk dipahami dalam beberapa pengertian intelektual. Mereka adalah simbol kultural (seperti tongkat kekuasaan, rambut palsu, atau jubah) yang menuntut agar penggunaanya dipercaya atau dipatuhi. Bahasa merupakan bagian aktivitas di mana sebagian orang mendominasi sebagian lainnya. Sebagaimana orang-orang yang memiliki modal finansial memegang kendali atas orang-orang yang tidak memilikinya, demikian juga orang-orang yang memiliki modal linguistik mengontrol orang-orang yang memiliki sumber-sumber terbatas. Sebab, bahasalah yang mendefinisikan suatu kelompok dan memberi seseorang (seorang juru bicara) otoritas di dalam kelompok tersebut, serta memberi kekuasaan untuk berbicara atas kelompok itu. Di sinilah, menurut Bourdieu, para filsuf seperti Austin tersesat. Sebab mereka mencoba memahami bahasa secara terpisah dari masyarakat yang menggunakannya. Mencari di dalam bahasa sumber kekuasaannya, berarti melupakan bahwa otoritas-otoritas datang kepada bahasa dari luar dirinya seperti yang ditunjukkan secara konkrit oleh *skeptron* (tongkat kekuasaan) yang, (menurut Homer) diserahkan pada orator ketika ia bangkit untuk berpidato.

Bahasa, kemudian, harus diberi otoritas. Ini biasanya berarti bahwa seseorang diberi otoritas untuk berbicara (atau mengungkapkan berbagai performatif). Tentu saja, baik Wittgenstein maupun Austin menyadari hal ini, namun sementara mereka memandang hal tersebut sebagai konteks bahasa yang netral, Bourdieu melihat komponen kekuasaan sebagai hal yang sentral. Status, gaya, cara berbicara adalah hal yang satu dan sama: mereka mengindikasikan seseorang tertentu harus dipercaya, dipatuhi, atau dihormati. Ini menandai sebuah keputusan penting (meski kontroversial) dengan tradisi linguistik yang berasumsi bahwa sementara 'ungkapan-ungkapan performatif' menyandarkan efektifitasnya pada sebagian fakta tentang para pendengar, ungkapan-ungkapan deskriptif hanya menuntut kondisi-kondisi yang sesungguhnya, (dalam Harker, 2009:219).

C. Metode Penelitian

Menurut Bogdan dan Taylor metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, (dalam Moleong, 2002:3).

1. Sumber Data

Menurut Lofland, Sumber data adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah

data tambahan seperti dokumen dan lain-lain, (dalam Moleong, 2002:112). Berdasarkan pendapat tersebut, sumber data dalam penelitian ini adalah novel yang berjudul *Lampuki* karya Arafat Nur, yang memiliki *cover* berwarna merah, dan di bagian *cover* depan tergambar sosok pria berkumis tebal yang sedang membawa senjata api. Novel tersebut memiliki 434 halaman, yang diterbitkan pada bulan Mei 2011. Novel *Lampuki*, merupakan salah satu pemenang unggulan sayembara menulis Dewan Kesenian Jakarta (DKJ), tahun 2010

2. Metode Pengumpulan Data

Data penelitian ini ialah data yang tertulis diperoleh dengan cara mencatat, mengutip teks yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut.

- a. Membaca novel secara keseluruhan untuk memahami isi cerita secara keseluruhan
- b. Pengkodean yaitu penggunaan kode-kode pada tiap data pada novel untuk mempermudah klasifikasi data dengan cara menandai dengan garis bawah pada cuplikan-cuplikan yang berhubungan dengan kekerasan secara fisik, kultural, dan simbolik. Kemudian mencatat dan mengutip bagian-bagian yang dijadikan data pada kertas lain agar jelas sumbernya.
- c. Dari langkah tersebut, kemudian data yang terkumpul diidentifikasi sesuai dengan rumusan masalah yakni tindak kekerasan secara fisik, kultural, dan simbolik.
- d. Langkah selanjutnya ialah pengklasifikasian (mengelompokkan data) sesuai dengan tindak kekerasan fisik, kultural, dan simbolik.
- e. Apabila dirasa peneliti belum mendapat data yang cukup maka peneliti akan mengulangi dari awal sampai akhir hingga sampai pada titik jenuh.

3. Metode Analisis Data

Kegiatan yang dilakukan pada bagian ini adalah membaca dan menganalisis novel *Lampuki* karya Arafat Nur. Kegiatan ini harus dilakukan berulang-ulang agar data yang diperoleh semakin akurat. Adapun langkah-langkah yang ditempuh yaitu :

- a. Membaca keseluruhan isi cerita novel *Lampuki* karya Arafat Nur terlebih dahulu sehingga memperoleh gambaran umum tentang isi bacaan secara cermat dan berulang-ulang.
- b. Berdasarkan data yang terkumpul dan telah teridentifikasi kemudian dianalisis isi bacaan sesuai dengan teori dan faktor-faktor yang membangun karya sastra secara umum dengan cara mendeskripsikan secara jelas dan terperinci sesuai dengan data yang diperoleh.
- c. Interpretasi yang dilakukan untuk memberikan pendapat dan penafsiran sesuai dengan kategori permasalahan dan sesuai dengan teori yang digunakan.
- d. Eksplanasi merupakan penjelasan dari fakta-fakta dan penafsiran dalam proses interpretasi.

- e. Pendeskripsian yang merupakan pemaparan dengan sejelas-jelasnya data-data sesuai dengan kategori kekerasan fisik, kultural, dan simbolik.

D. Pembahasan

1. Bentuk Kekerasan Fisik yang dilakukan Negara Pada Warga dalam Novel Lampuki.

Kekerasan merupakan sebuah tindakan represif yang disebabkan oleh pembiaran kemasabodohan, tekanan, provokasi dan hilangnya kesadaran nurani, untuk kembali ke kehidupan yang rasional. Kekerasan dapat dilakukan oleh personal, kelompok, maupun sebuah sistem (negara).

Kekerasan yang dilakukan negara, dapat dilakukan oleh aparatnya, maupun sistem itu sendiri. Misalnya, dengan peraturan-peraturan tertentu. Hal tersebut, membuktikan bahwa, kekuasaan dalam politik totaliter diciptakan bukan untuk, menegakkan ketertiban dan keadilan, tetapi mngendalikan kehendak setiap individu tunggal. Akibatnya, warga negara kehilangan kemampuan berpikir dan menilai kritis. Pembiasaan kejahatan menjadi tujuan dari kekuasaan. Berikut adalah kutipan terkait dengan kekerasan negara.

“Tidak lama setelah Teungku Daud bersedia turun gunung, Karno tumbang digantikan jendral sipit berhati keji. Dialah yang melancarkan serangan dan pembunuhan-pembunuhan masal di kampung-kampung kami. Sejak itulah dimulai Tahun-Tahun Pembantaian yang merenggut begitu banyak korban penduduk yang sudah menyelamatkan negeri mereka dari kehancuran” (Nur, 2011:28-29).

Berdasarkan kutipan di atas, penyerangan yang dilakukan oleh aparat terhadap warga, dimulai sejak bergulirnya rezim Orde Baru. Pada masa peralihan kekuasaan itulah tahun-tahun pembantaian mulai digencarkan oleh aparat, sehingga merenggut banyak korban jiwa. Kondisi sedemikian terjadi, lantaran adanya aksi pemberontakan, yang dilakukan oleh sebagian rakyat Aceh, karena, kebijakan pemerintah dirasa kurang berpihak kepada mereka. Hal itulah yang menjadi pemicu hilangnya kesadaran nurani seseorang, yang kemudian berujung pada aksi radikal.

Hal tersebut membuktikan, selain di belahan dunia lain, ternyata rakyat Indonesia juga pernah merasakan kekuasaan totaliter. Dalam prinsip kekuasaan totaliter terbagi atas empat kategori sebagai berikut. Pertama, legitimasi gampang atas pelanggaran hak asasi manusia atas nama tujuan-tujuan ideologi. Kedua, monopoli informasi dengan alasan bahwa pemerintah lebih tahu apa yang harus dilakukan masyarakat, tahu apa yang boleh ditonton, dibaca, dan didiskusikan. Ketiga, pembatasan pengorganisasian masyarakat pada organisasi-organisasi yang disiapkan pemerintah. Keempat, penggunaan cara-cara di luar hukum untuk mengancam tidak hanya yang dianggap penjahat, tapi juga seluruh masyarakat, agar takut dan tidak berani mempertanyakan kebijakan penguasa. Prinsip-prinsip itulah yang menjadikan negara

memiliki kekuasaan tanpa batas, sehingga mekanisme yang sedang berjalan tidak lagi rasional dengan peraturan-peraturan yang sudah ditentukan.

Pemerintah dengan sengaja membuat warga menjadi terisolir, melumpuhkan segala aktivitas mereka, dengan tujuan mematkan pola pikir warga agar menjadi tumpul. Sehingga, aparat dengan mudah mengendalikan dan menggiring mereka ke dalam lingkaran permainan politik, dengan berdasarkan pada ideologi totaliter. Dapat dipahami, ketika ruang-ruang diskusi bagi masyarakat dianggap sebagai sebuah pelanggaran, maka konsekuensinya adalah kekerasan. Masyarakat dianggap musuh negara, apabila mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang membicarakan atau menyindir kebijakan-kebijakan negara, yang mengacu pada provokasi masyarakat lainnya. Sehingga, pada masa Orde Baru tidak ada pengorganisasian masyarakat sebagai sebuah kontrol bagi setiap kebijakan yang diputuskan oleh penguasa.

2. Bentuk Kekerasan Kultural yang dilakukan Negara Pada Warga dalam Novel Lampuki

“”Apa salah kumis-kumis mereka sehingga harus dianiaya pemiliknya di bunuh?” Majid berucap dengan muka padan” (Nur, 2011:335).

“Malangnya, sewaktu ribuan prajurit mengincar Ahmadi, sejumlah lelaki yang memiliki kumis tebal kerap menemui celaka, dianiaya, dan malah ada yang di tembak mati”(Nur, 2011:294).

Kutipan di atas, menunjukkan, warga yang memiliki kumis dianggap sebagai pemimpin pemberontak. Hal ini merupakan kekerasan kultural yang merujuk pada ikon kumis. Kumis seseorang dianggap memiliki keterkaitan dengan aksi pemberontakan.

Paradigma yang diciptakan oleh aparat, menunjukkan bahwa, negara memiliki kekuatan untuk mengubah sebuah tradisi yang telah lahir masa lampau. Dengan berbekal manipulasi dan kebohongan, negara membuat paradigma-paradigma baru, yang sesuai dengan penilaian mereka. Selain itu kutipan di bawah ini juga menunjukkan hal yang sedemikian.

“Cuma berselang dua hari selepas kematian Tanjil, orang-orang pos kembali menembaki seorang pemuda hanya gara-gara rambutnya terlalu panjang. Mereka berprasangka bahwa pemuda gondrong bernama Anwar itu biang pemberontakan yang sering membikin kekacauan di seputar lingkungan Kampung Atas” (Nur, 2011:288).

“Si komandan Pos tidak percaya pada keterangan sejumlah orang tentang diri anak itu. Mereka merasa penduduk telah terlalu sering menipu mereka. Sukijan bahkan menuding orang-orang telah bersekongkol dan berusaha melindungi Anwar. Siang itu juga sejumlah prajurit mengepung rumah Anwar dengan bidikan senjata. Tak lama kemudian terdengarlah salak tembakan yang ramai dan memekakan telinga, menimbulkan kepanikan luar biasa. Nahas betul nasibnya, sebelum cita-citanya tercapai dia mati di ujung senapan. Tubuh

kurusnya bolong-bolong di cabik puluhan logam peluru di kebun pisang belakang rumah. Entah ketika itu dia hendak buang hajat atau memang mau pergi minggat lagi. Kala jasadnya dimandikan selangkanganya penuh kotoran, sampai salah seorang yang memandikanya muntah-muntah” (Nur, 2011:288-289).

Kutipan di atas, menggambarkan kekerasan yang mengacu pada kekerasan kultural, dengan ikon rambut panjang. Rambut panjang, oleh aparat dinilai sebagai rambut para pelaku pemberontak, sehingga para aparat mengubah paradigma rambut panjang seseorang, dengan memiliki keterkaitan tentang kegiatan para gerilyawan. Hal ini menjadi sebuah polemik tersendiri, sikap gegabah mencerminkan ketidakmampuan seseorang dalam mencerna setiap hal dengan baik. Sehingga kesalahan-kesalahan tersebut, akan terus terulang manakala kedangkalan para aparat dalam berpikir terus disertai dengan rasa benci, dendam, dan sikap main hakim sendiri.

3. Bentuk Kekerasan Simbolik yang dilakukan Negara Pada Warga dalam Novel Lampuki

“Guna meyakinkan penduduk, Sukijan menjelaskan secara tegas dan suaranya menggema, “Anwar melawan saat kami tangkap. Itu sudah cukup bukti bagi kami siapa sesungguhnya dia itu. Apalagi dia menembaki tentara. Padahal kami tiada ingin menembaknya. Kami terpaksa membela diri. Anak itu sangat berbahaya. Dia memang dalang kerusuhan di sini. Pemberontak jahat. Laknat!

Sebetulnya, semua orang sudah tahu kalau Anwar tidak memiliki senjata, tetapi tiada yang berani membantah manakala Sukijan menyatakan bahwa mereka menemukan pistol di pinggang Anwar begitu tubuhnya menjadi bangkai. Dengan alasan semacam itulah pembunuhan atasnya dan atas sejumlah orang lain di tanah ini dibenarkan oleh negara yang berazaskan kemanusiaan yang adil dan beradab”(Nur, 2011:291).

Kutipan di atas, memperlihatkan manipulasi informasi yang yang ditunjukkan oleh aparat, mampu memberikan efek kekuatan untuk mengontrol sebuah kondisi. Hal tersebut sekaligus membuktikan bahwa, hal yang irasional, dapat diubah menjadi rasional, apabila personal yang menggunakan otoritas bahasa, mampu memnguasainya dengan baik.

Dalam menjalankan mekanismenya, rezim Orde Baru melegalkan segala cara, untuk melancarkan pelaksanaan-pelaksanaan ideologinya, dengan tujuan mempertahankan kekuasaan. Kutipan di bawah ini, juga menunjukkan otoritas bahasa yang digunakan untuk mendominasi golongan.

“”Percayalah, kalau saya jadi presiden, tidak aka ada lagi darah orang

Aceh yang tumpah setetes pun!” ujarnya ketika itu yang menimbulkan rasa haru-biru di hati kami semua sehingga ucapan itu begitu saja kami percaya tanpa mengingat lagi masa lalu ayahnya” (Nur, 2011:414-415).

Dari kutipan di atas, dapat di pahami, slogan-slogan yang beraroma politik digunakan penguasa, untuk meyakinkan segenap warga, dengan tujuan memperoleh restu dari mereka. Sehingga, semakin lebarlah jalan yang dimiliki penguasa untuk memaksakan ideologi dan mekanisme-mekanisme politiknya.

Selain itu, kekerasan simbolik sebenarnya lebih menekankan pada prinsip membuat seseorang merasa bersalah, sehingga secara teori kekerasan tersebut cenderung mencari ruang-ruang sosial, sebagai wadah untuk memperlihatkan eksistensi dalam mendominasi yang lain.

Dapat disimpulkan bahwa, bahasa memiliki otoritas ketika digunakan oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan lebih luas atas mereka yang terdominasi. Selain itu, bahasa juga akan memberikan kekuatannya, apabila digunakan pada kondisi tertentu. Jadi, terdapat hubungan langsung antara bahasa yang memberi otoritas, orang yang diberi otoritas, dan urusan-urusan yang diotoritaskan.

E. Simpulan

Dari pembahasan di atas dapat diketahui bahwa, pada masa Orde Baru negara memiliki kekuasaan tanpa batas untuk mengendalikan masyarakatnya, dengan berbagai cara, salah satunya menggunakan kekerasan, kekerasan dinilai memiliki efektifitas yang tinggi terutama untuk merealisasikan ideologi-ideologi totaliter, yang dianut penguasa tunggal.

Pustaka

- Boerdieu, Pierre. 2010. *Arena Produksi Kultural Sebuah Kajian Sosiologi Budaya*. Bantul: Kreasi Wacana.
- Harker, Richard dkk. 2009. *(Habitus X Modal) + Ranah = Praktik: Pengantar Paling Komprehensif Kepada Pemikiran Bourdieu*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Moleong, M.A, Lexy J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nur, Arafat. 2011. *Lampuki*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
- Pitaloka, Rieke Diah. 2010. *Banalitas Kekerasan*. Depok: Koekoesan.